

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA DAN KOMUNITAS
YANG BERKELANJUTAN
(STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD GHAZY AL GHIFARI
NPM 2216021081**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA DAN KOMUNITAS
YANG BERKELANJUTAN
(STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

MUHAMMAD GHAZY AL GHIFARI

Kota Bandar Lampung sebagai wilayah perkotaan yang berkembang masih menghadapi berbagai permasalahan dalam mewujudkan kota berkelanjutan, seperti kawasan kumuh, rumah tidak layak huni, pengelolaan sampah, dan keterbatasan ruang terbuka hijau. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam *SDGs* tujuan ke-11 tentang Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *SDGs* 11 di Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, koordinasi antar perangkat daerah telah berjalan, tetapi masih terdapat kendala dalam penyamaan persepsi dan sosialisasi. Pada aspek sumber daya, masih ditemukan keterbatasan sumber daya manusia, dan sarana pendukung. Pada aspek disposisi, terdapat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung *SDGs* 11, tetapi konsistensi pelaksanaan masih perlu diperkuat. Pada aspek struktur birokrasi, pembagian kewenangan telah tersedia, namun integrasi dan koordinasi lintas sektor masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *SDGs* 11 di Kota Bandar Lampung telah berjalan secara administratif, tetapi belum sepenuhnya optimal secara substantif. Diperlukan penguatan koordinasi, kapasitas sumber daya, dan integrasi kebijakan untuk mendukung pencapaian kota dan komunitas yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, *SDGs* 11, Kota Berkelanjutan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CITY AND COMMUNITY PROGRAMS SUSTAINABLE (STUDY IN BANDAR LAMPUNG CITY)

By

MUHAMMAD GHAZY AL GHIFARI

The city of Bandar Lampung as a developing urban area still faces various problems in realizing a sustainable city, such as slums, waste management, and limited green open space. These problems show that there are challenges in the SDGs of goal 11 on Sustainable Cities and Communities. This study aims to analyze the implementation of SDGs 11 in the city of Bandar Lampung and the factors that affect its implementation. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews and documentation. The research analysis uses George C. Edward III's policy implementation theory which consists of communication variables, resources, disposition, and bureaucratic structure. In the aspect of communication, coordination between regional apparatus has been running, but there are still obstacles in equalizing perception and socialization. In terms of resources, there are still limitations in human resources and supporting facilities. In terms of disposition, there is a commitment of local governments to support SDGs 11, but consistency of implementation still needs to be strengthened. In terms of bureaucratic structure, the division of authority is available, but integration and coordination across sectors still need to be improved. Based on the results of the study, the implementation of SDGs 11 in Bandar Lampung City has been running administratively, but it has not been fully optimal substantively. Strengthening coordination, resource capacity, and policy integration is needed to support the sustainable achievement of cities and communities.

Keywords: Policy Implementation, SDGs 11, Sustainable Cities

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA DAN KOMUNITAS
YANG BERKELANJUTAN
(STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Oleh

MUHAMMAD GHAZY AL GHIFARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA DAN KOMUNITAS YANG BERKELANJUTAN (STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Ghazy Al Ghifari**

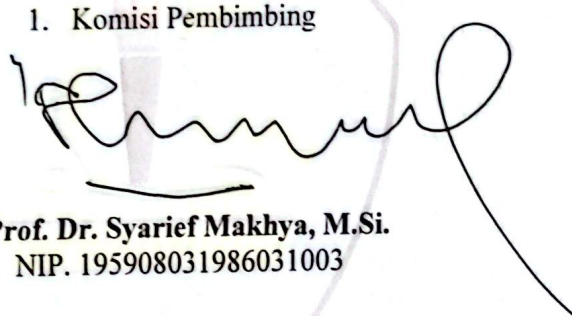
Nomor Pokok Mahasiswa : **2216021081**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

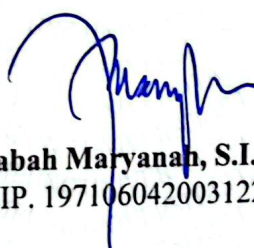
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si.
NIP. 195908031986031003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

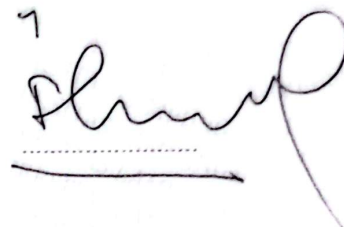


Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.
NIP. 197106042003122001

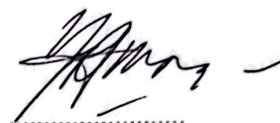
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si.



Penguji : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Mei 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Ghazy Al Ghifari
NPM 2216021081

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Ghazy Al Ghifari, dilahirkan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 24 Juni 2004, sebagai anak pertama dari empat saudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Al-Kautsar Bandar Lampung. Pendidikan menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 2 Bandar Lampung, dan pendidikan menengah atas diselesaikan di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sebagai bagian dari kegiatan akademik, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, penulis juga melaksanakan program magang di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5–6)

“Dan Bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS. Ar-Ruum: 60)

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”

(Tan Malaka)

“Aku tidak pernah menyesali diamku, tetapi aku sering menyesali perkataanku.”

(Umar Bin Khattab)

“Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.”

(Muhammad Ali)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan ketulusan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Ayah dan Bunda

Sebagai wujud rasa terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta motivasi yang tiada henti diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Bunda.

Keluarga Besar Tersayang

Yang selalu memberikan doa, perhatian, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam setiap langkah perjalanan hidup.

Bapak dan Ibu Dosen

Yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, serta pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan di Kota Bandar Lampung”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ayah Dedi Yuginta dan Bunda Sofiati**, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta motivasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas seluruh pengorbanan, perhatian, dan cinta tulus yang telah diberikan tanpa henti.
2. **Ibu Tabah Maryanah ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, sekaligus dosen pembimbing akademik**. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, arahan, serta bimbingan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan lebih baik.
3. **Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu, perhatian, dukungan, motivasi, dan bimbingan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

4. **Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Dosen Penguji Skripsi,** Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. **Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan,** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. **Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Ibu Merta dan Mba Wulan,** yang telah banyak membantu penulis, khususnya dalam urusan administrasi dan pemberian informasi selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi.
7. **Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung,** yang senantiasa berperan dalam membangun pembelajaran yang positif dan inspiratif, serta memberikan berbagai dukungan yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademik maupun kemampuan berorganisasi secara optimal.
8. **Seluruh Informan Penelitian,** yaitu Ibu Lena Maryana, Bapak Harry Gumanti, Ibu Fitri Yanti, Ibu Rein Susinda Hesty Bapak Nirma Thano, dan Bapak Dedi Yuginta, yang telah meluangkan waktu serta memberikan informasi dan pengetahuan yang sangat membantu dalam proses pengumpulan data penelitian.
9. **Seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bandar Lampung,** yang telah memberikan pengalaman berharga selama kegiatan magang serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
10. **Seluruh pegawai di Bidang Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah di BAPPERIDA,** yang telah membantu dan memberikan pembelajaran saat magang serta sudah banyak berbuat baik kepada penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan	12
2.2 <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	15
2.2.1 Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan (<i>SDGs</i> 11).....	15
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	18
2.4 Model Implementasi George C Edward III.....	20
2.4.1 Komunikasi.....	21
2.4.2 Sumber Daya	21
2.4.3 Disposisi	22
2.4.4 Struktur Birokrasi	23
2.5 Penelitian Terdahulu	23
2.6 Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Tipe Penelitian	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Fokus Penelitian	30
3.4 Informan Penelitian.....	33
3.4.1 Kriteria Pemilihan Informan.....	33
3.4.2 Daftar Informan Penelitian	34
3.5 Jenis dan Sumber Data	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36

3.7 Teknik Analisis Data.....	38
3.8 Teknik Keabsahan Data	40
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum	42
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	53
4.2.1 Program <i>SDGs</i> 11 di Kota Bandar Lampung	53
4.2.2 Implementasi Program <i>SDGs</i> 11 di Kota Bandar Lampung.....	55
4.3 Pembahasan.....	59
4.3.1 Implementasi Program <i>SDGs</i> 11 (Kota dan Komunitas Yang Berkelanjutan)	59
4.3.1.1 Komunikasi	60
4.3.1.2 Sumber Daya	72
4.3.1.3 Disposisi (Sikap dan Komitmen Pelaksana)	86
4.3.1.4 Struktur Birokrasi.....	93
4.3.2 Analisis Implementasi Program <i>SDGs</i> 11 (Kota dan Komunitas Yang Berkelanjutan)	97
V. SIMPULAN DAN SARAN	106
5.1 Simpulan	106
5.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk Tahun 2023	5
Tabel 1.2 Jumlah Persentase Ketersediann Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung Tahun 2009 - 2022	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	35
Tabel 4. 1 Kawasan Kumuh Tersisa 2024	52
Tabel 4. 2 Tabel Program SDGs 11 Kota Bandar Lampung.....	61
Tabel 4. 3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Pencapaian SDGs 11 Kota Bandar Lampung.....	62
Tabel 4. 4 Dukungan Anggaran Program dalam Implementasi SDGs 11 Kota Bandar Lampung	74
Tabel 4. 5 Sarana Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.....	80
Tabel 4. 6 Dukungan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Implementasi SDGs 11 Kota Bandar Lampung	82
Tabel 4. 7 Dukungan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau dalam Implementasi SDGs 11 Kota Bandar Lampung	84
Tabel 4. 8 Bentuk Komitmen dan Peran Multipihak dalam Mendukung Implementasi SDGs 11 di Kota Bandar Lampung	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 2 Analisis Data Interaktif	39
Gambar 3 Peta Tata Guna Lahan Kota Bandar Lampung.....	49
Gambar 4 Proporsi Kawasan Lindung	50
Gambar 5 Musyawarah Perencanaan Pembangunan	66
Gambar 6 Forum Koordinasi dan Asistensi Antar Dinas.....	67
Gambar 7 RKPD Kota Bandar Lampung 2025.....	70
Gambar 8 Kemitraan Multi Pihak Inovasi SDGs 11	87
Gambar 9 Workshop Multi-Stakeholder Partnership (MSP)	88
Gambar 10 Wawancara dengan informan (Rein Susinda Hesty-BAPPERIDA)	112
Gambar 11 Wawancara dengan informan (Fitri Yanti-BAPPERIDA).....	112
Gambar 12 Wawancara dengan informan (Lena Maryana-DLH)	113
Gambar 13 Wawancara dengan informan (Harry Gumanti-Disperkim).....	113
Gambar 14 Wawancara dengan informan (Dedi Yuginta-DPRD)	114

DAFTAR SINGKATAN

<i>SDGs</i>	: <i>Sustainable Development Goals</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPERIDA	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Riset dan Inovasi Daerah
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
PKN	: Pusat Kegiatan Nasional
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
<i>WCED</i>	: <i>World Commission on Environment and Development</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
VLR	: <i>Voluntary Local Review</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan perkotaan di era modern menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Dinamika urbanisasi yang pesat telah mengubah lanskap global, menjadikan kota-kota sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi, inovasi sosial, dan pusat kebudayaan. Namun, di balik potensi yang besar ini, kota-kota juga rentan terhadap berbagai permasalahan struktural dan fungsional, seperti kesenjangan sosial-ekonomi yang melebar, degradasi lingkungan yang serius, serta keterbatasan dan tidak merataan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar. Permasalahan ini, jika tidak ditangani secara efektif, dapat mengancam keberlanjutan kota dan kualitas hidup warganya (Trifita & Amaliyah, 2020). Menyadari urgensi tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merumuskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) sebagai cetak biru universal untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia dan planet bumi.

SDGs mencakup 17 tujuan yang saling terkait, dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, aksi iklim, kehidupan bawah air, kehidupan di darat, perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat, serta kemitraan untuk mencapai tujuan (Wadhwani & Malpani, 2023). Di antara tujuan-tujuan

tersebut, *SDGs* 11, yaitu Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan Istilah tersebut tidak dipisahkan menjadi kota atau komunitas karena konsep pembangunan berkelanjutan dalam *SDGs* 11 melihat keterkaitan antara aspek fisik perkotaan dengan kondisi sosial masyarakat yang berada di dalamnya.

SDGs 11 tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan tata kelola perkotaan, tetapi juga mencakup bagaimana suatu kota mampu menyediakan lingkungan yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, penggunaan konsep “Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan” dalam penelitian ini merupakan satu kesatuan konsep yang menggambarkan bahwa keberhasilan pembangunan perkotaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas ruang dan infrastruktur kota, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup yang layak dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *SDGs* 11 secara utuh untuk menganalisis implementasi pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung (*United Nations*, 2015)

Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan memiliki posisi krusial. Tujuan ini secara spesifik menyoroti peran sentral kota sebagai mesin pertumbuhan dan inovasi, sekaligus menekankan perlunya transformasi perkotaan menuju model yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi masa depan, yang mampu menahan guncangan dan tekanan, serta memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal (Bappenas, 2020).

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan laju urbanisasi yang signifikan, sangat berkepentingan dalam mengimplementasikan *SDGs* 11. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai regulasi dan kebijakan nasional yang menjadi landasan hukum bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Salah satu payung hukum utama adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang secara eksplisit mengamanatkan integrasi *SDGs* ke dalam rencana pembangunan

nasional dan daerah. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjadi pondasi bagi perencanaan tata ruang yang terstruktur, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, yang mengatur penyediaan hunian layak dan penanganan kawasan kumuh, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi kepada pemerintah lokal untuk menyelenggarakan pembangunan yang relevan.

Kota-kota di Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang produktif, tetapi juga entitas yang adil secara sosial, inklusif, dan bertanggung jawab secara lingkungan. Dalam konteks ini, Kota Bandar Lampung, sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung, memegang posisi strategis dan peran vital dalam konstelasi pembangunan regional. Kota ini terletak di wilayah yang sangat strategis karena merupakan jalur transit utama kegiatan perekonomian antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041, Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Penetapan ini mengindikasikan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki fungsi strategis dalam skala nasional, khususnya sebagai pusat pelayanan di bidang pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, serta perumahan (Simarmata et al., 2023).

Secara geografis, Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah sekitar 18.373 hektar. Dari total luas tersebut, sekitar 14.200 hektar merupakan lahan terbangun, yang mencerminkan tingkat urbanisasi dan pengembangan infrastruktur yang signifikan. Selain itu, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021), Kota Bandar Lampung juga memiliki Kawasan Hutan Lindung seluas 437 hektar dan lahan pangan pertanian berkelanjutan seluas 186 hektar. Keberadaan kawasan lindung dan lahan pertanian ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan pembangunan dengan

pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan di tengah pesatnya pertumbuhan kota (Simarmata et al., 2023).

Namun, pertumbuhan dan perkembangan yang pesat ini juga diiringi oleh serangkaian tantangan perkotaan yang kompleks, yang menuntut perumusan strategi perencanaan yang matang, implementasi yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan tercapainya visi kota yang berkelanjutan. Visi Kota Bandar Lampung untuk bertransformasi menjadi kota metropolitan pada tahun 2030 menuntut perhatian serius terhadap berbagai isu perkotaan yang ada. Data dan kondisi umum Kota Bandar Lampung, sebagaimana diuraikan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, menunjukkan adanya permasalahan multidimensional yang perlu diatasi secara terpadu dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan ini secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan indikator-indikator kunci dalam *SDGs* 11.

Pertumbuhan penduduk terus meningkat, pada Tahun 2023, penduduk Bandar Lampung berjumlah 1.202.070 jiwa dengan *sex ratio* 102,48 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Adapun kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tinggi adalah Kecamatan Tanjung Karang Timur yakni sebesar 18.619 jiwa/km², Kepadatan penduduk tersebut berkaitan dengan jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah administratif sehingga sangat dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk dan perpindahan penduduk pada suatu wilayah administrasi. Berikut adalah data yang menunjukkan kepadatan penduduk per kecamatan:

Tabel 1. 1 Kepadatan Penduduk Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
Telukbetung Barat	38.527	2.110
Telukbetung Timur	49.926	4.805
Telukbetung Selatan	39.359	11.278
Bumi Waras	58.169	12.869
Panjang	74.858	5.488
Tanjung Karang Timur	38.542	18.619
Kedamaian	53.457	6.410
Telukbetung Utara	50.587	11.550
Tanjung Karang Pusat	50.326	14.379
Enggal	25.752	9.263
Tanjung Karang Barat	63.194	5.476
Kemiling	86.300	4.046
Langkapura	43.372	8.183
Kedaton	52.388	13.896
Rajabasa	55.958	4.328
Tanjung Senang	62.402	6.753
Labuhan Ratu	48.208	7.903
Sukarame	67.138	6.148
Sukabumi	73.178	2.922
Way Halim	68.468	10.955

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, 2025

Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2024 (Juni) sebesar 1,12 persen. Ini menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan penduduk di bandar lampung, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,02. Perlu diperhatikan bahwa memerlukan perencanaan yang cermat terkait penyediaan layanan dasar dan ruang hidup. Akumulasi penduduk dari tahun-tahun sebelumnya menciptakan tekanan. Kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa kecamatan, seperti Tanjung Karang Pusat (14.379 jiwa/km²) dan Kedaton (13.896 jiwa/km²), mengindikasikan bahwa lahan perkotaan semakin terbatas, memicu persaingan penggunaan lahan dan potensi munculnya permukiman padat.

Kepadatan ekstrem ini juga secara langsung menuntut peningkatan kapasitas layanan publik yang masif, termasuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi

publik yang efisien, serta penyediaan ruang terbuka yang memadai. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan ini dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, memicu konflik sosial, dan menghambat pencapaian kota yang inklusif dan layak huni (Yanuar et al., 2024). Perda No. 4 Tahun 2021 Pasal 8 huruf a angka 5 secara eksplisit menyatakan strategi untuk "melengkapi prasarana dan sarana lingkungan serta fasilitas pelayanan umum secara merata di setiap hirarki pusat kegiatan pelayanan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada rencana, kebutuhan sarana fisik terus menjadi tantangan seiring laju urbanisasi.

Laju pembangunan yang tidak terkendali dan seringkali kurangnya penegakan rencana tata ruang yang ketat dapat menyebabkan pergeseran penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Fenomena ini seringkali memicu konversi lahan pertanian produktif menjadi permukiman atau area industri tanpa perencanaan yang matang, yang tidak hanya mengurangi ketahanan pangan lokal tetapi juga mengurangi area resapan air alami, sehingga meningkatkan risiko banjir dan kekeringan. Pergeseran ini juga dapat mengancam keberadaan kawasan lindung dan lahan pangan pertanian berkelanjutan yang telah ditetapkan (Aziz et al., 2021). Di Kota Bandar Lampung luas lahan terbangun saat ini sekitar 9.983,34 Ha atau sekitar 54,33 persen dari total luas Kota Bandar Lampung (18,374 Ha), sementara lahan yang belum terbangun sekitar 8.390,66 Ha atau sekitar 45,67 persen (RKPD 2025, hal. II-11).

Meskipun Kota Bandar Lampung memiliki Kawasan Hutan Lindung seluas 437 hektar dan lahan pangan pertanian berkelanjutan seluas 186 hektar (RKPD 2025, hal. II-14), data menunjukkan bahwa "luas areal terluas adalah luas lahan non pertanian. Hal ini berarti Kota Bandar Lampung telah menjadi Kota Metropolitan yang ditunjukkan dengan luas lahan pertanian yang semakin berkurang dan luas lahan non pertanian yang cenderung meningkat. Terjadi peningkatan areal untuk pemukiman dalam beberapa tahun terakhir" (RKPD 2025, hal. II-14).

Perda No. 4 Tahun 2021 Pasal 22 ayat (2) bahkan menyebutkan adanya "usulan perubahan peruntukan kawasan hutan lindung menjadi kawasan perumahan (*holding zone*) seluas kurang lebih 2 (dua) hektar," yang menunjukkan tekanan nyata terhadap lahan konservasi di tengah kebutuhan pembangunan. Hal ini kontras dengan strategi Perda Pasal 8 huruf d tentang "pengendalian, pemulihan, pelestarian dan rehabilitasi kawasan lindung" dan Pasal 8 huruf e tentang "pengembangan kawasan budidaya secara proporsional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup."

Konsekuensi langsung dari pergeseran penggunaan lahan yang tidak teratur ini adalah pertumbuhan permukiman kumuh yang tidak terencana dan tidak terkontrol. Permasalahan ini seringkali menjadi konsekuensi tak terhindarkan dari urbanisasi yang cepat tanpa diimbangi perencanaan perumahan yang terjangkau dan kebijakan tata ruang yang efektif (Pigawati, 2015). Pada tahun 2024, luas kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung tercatat sebesar 180,94 Ha yang tersebar di 13 Kecamatan dan 27 Kelurahan, dengan persentase luas kumuh tertangani pada tahun 2023 hanya 0,96 persen (RKPD 2025, hal. II-47). Dari Keputusan Wali Kota Bandar Lampung No. 660/IV.01/HK/2024 Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh Kota Bandar Lampung.

Permukiman kumuh bertentangan dengan prinsip kota yang aman dan tangguh dalam *SDGs* 11. Meskipun Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh menjadi pedoman, serta Perda No. 4 Tahun 2021 Pasal 35 mengatur tentang kawasan permukiman dan perumahan, realitas pertumbuhan permukiman kumuh menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam memastikan akses merata terhadap hunian layak dan infrastruktur dasar yang memadai.

Kota Bandar Lampung juga kurang ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam perencanaan kota. Ruang terbuka hijau

(RTH) publik di Kota Bandar Lampung saat ini berjumlah 658,57 Ha atau sekitar 4,37% dari total luas lahan terbangun Kota Bandar Lampung (RKPD 2025, hal. II-13). Berikut data persentase ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung seperti yang tertera di bawah ini.

Tabel 1. 2 Jumlah Persentase Ketersediann Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung Tahun 2009 - 2022

No	Tahun	Luas Kota Bandar Lampung (Km ²)	Luas RTH (Ha)	Persentase (%)
1	2009	19.722	2.489,80	12,62%
2	2012	19.722	2.185,59	11,08%
3	2015	19.722	2.121,22	10,75%
4	2020	19.722	1.873,59	9,5%
5	2022	19.722	909,54	4,61%
6	2025	19.722	658,57	4,37%

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, terlihat bahwa luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan setiap tahunnya secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan RTH di kota tersebut belum berjalan secara optimal. Pembangunan yang berlangsung tidak selaras dengan upaya pelestarian dan penambahan ruang terbuka hijau. Bahkan, beberapa kawasan RTH yang sudah ada justru beralih fungsi. Selain itu, maraknya alih fungsi lahan milik pribadi menjadi bangunan komersial seperti ruko semakin memperparah berkurangnya ketersediaan RTH, yang kini kian terbatas dan sulit dikendalikan.

Perda No. 4 Tahun 2021 Pasal 8 huruf d angka 4 secara tegas menargetkan "mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan". Meskipun target dan klasifikasi telah ditetapkan dalam Perda, realitas "kurangnya" RTH jauh dari target 30% yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanahkan ketersediaan RTH sebesar 30% yang terdiri

dari RTH *public* sebesar 20% dan RTH *private* sebesar 10% dari luas wilayah terbangun kota.

Selain RTH pengelolaan sampah dan lingkungan yang belum optimal, dengan 92,85 persen rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak pada tahun 2023 (RKPD 2025, hal. II-72), target 100% akses sanitasi layak dari pemerintah pusat masih menjadi pekerjaan rumah. Volume sampah yang masuk ke TPA Bakung meningkat dari sekitar 600 ton/hari menjadi 750 ton/hari, Dari jumlah tersebut, sekitar 60% terdiri atas sampah anorganik, terutama sampah plastik, sementara sisanya 40% merupakan sampah organik. Padahal, TPA Bakung hanya memiliki luas sekitar 14,2 hektare dan dirancang untuk menampung beban maksimal sebesar 230 ton sampah per hari.

Ketidakseimbangan antara kapasitas daya tampung dan volume sampah yang masuk menyebabkan penumpukan yang semakin parah dari waktu ke waktu (Ajrina et al., 2021). Pengelolaan sampah di TPA Bakung masih menggunakan sistem *open dumping* karena *overload* dan ketinggian sampah mencapai lebih dari 20 meter, dengan hanya sekitar 10% sampah yang dikelola dengan sistem *control landfill* (RKPD 2025, hal. II-88 dan II-89). Data penanganan sampah menunjukkan bahwa pada tahun 2023, dari produksi sampah 786 ton/hari, volume sampah terangkut per hari adalah 767 ton/hari, dengan persentase 98% (Tabel 2.79, RKPD 2025, hal. II-87).

Meskipun kerangka regulasi dan fasilitas telah diidentifikasi dalam Perda, data akses sanitasi yang belum 100% layak dan permasalahan pengelolaan sampah yang masih mengandalkan *open dumping* menunjukkan bahwa implementasi dan efektivitas pengelolaan sampah dan limbah masih memerlukan perhatian serius untuk mencapai target lingkungan yang berkelanjutan. Menghadapi berbagai tantangan multidimensional tersebut, implementasi program Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan menjadi aspek penting dalam pembangunan Kota Bandar Lampung. Program ini merupakan upaya nyata dalam mewujudkan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* khususnya tujuan

ke-11, yaitu Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan.

Pelaksanaan program ini menuntut adanya keselarasan antara kebijakan, perencanaan, dan aksi nyata di lapangan. Pemerintah Kota Bandar Lampung Hambatan implementasi dapat muncul dari berbagai faktor, seperti komunikasi kebijakan yang belum efektif, keterbatasan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana yang beragam, serta struktur birokrasi yang masih kompleks. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi fokus utama dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah bagaimana implementasi *SDGs* 11 dijalankan di Kota Bandar Lampung, sekaligus mengidentifikasi kendala serta peluang dalam mewujudkan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada bagian latar belakang, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah :

Bagaimana implementasi Program *SDGs* (Kota dan Komunitas Yang Berkelanjutan) di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program kota dan komunitas yang berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui ketercapaian program kota dan komunitas yang berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.
3. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian program kota dan komunitas yang berkelanjutan di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi yang substansial, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan informasi dan komitmen pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan sinergistas *SDGs 11 (Sustainable Development Goals)* di Kota Bandar Lampung dengan program nasional dan internasional.
2. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konkret bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas implementasi program Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan pembangunan perkotaan yang berjalan inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) merupakan konsep fundamental yang telah menjadi agenda global dalam merespons tantangan kompleks antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Konsep ini pertama kali dipopulerkan melalui Laporan Brundtland tahun 1987, "*Our Common Future*," yang disusun oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)*. *WCED* (1987) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai suatu proses pembangunan yang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.. Definisi ini menekankan pentingnya keseimbangan intergenerasi dan intragenerasi, serta integrasi antara tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini muncul sebagai *respons* terhadap kekhawatiran yang berkembang mengenai dampak negatif industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali terhadap lingkungan global dan kesejahteraan sosial, yang sebelumnya telah disoroti oleh laporan seperti "*The Limits to Growth*" pada tahun 1972 (Haqqi, 2022). Menurut (Hidayat, 2024) secara lebih rinci, pilar-pilar pembangunan berkelanjutan, yang sering disebut sebagai "*triple bottom line*," mencakup:

1. Keberlanjutan Ekonomi

Pilar ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan PDB semata, melainkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini mencakup upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang layak (*decent work*) dengan upah yang adil dan kondisi kerja yang aman, mempromosikan inovasi dan pembangunan infrastruktur yang

tangguh dan berkelanjutan, serta memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Prinsipnya adalah bahwa aktivitas ekonomi harus dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan mengurangi kesenjangan pendapatan serta kekayaan. Contoh nyata dari praktik ekonomi berkelanjutan meliputi investasi pada sektor ekonomi hijau seperti energi terbarukan dan efisiensi energi, pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis komunitas dan ramah lingkungan, serta promosi pariwisata berkelanjutan yang menghormati budaya lokal dan lingkungan. Tujuannya adalah membangun ekonomi yang tangguh terhadap guncangan eksternal dan mampu memberikan kesejahteraan bagi semua tanpa merusak basis ekologisnya.

2. Keberlanjutan Sosial

Pilar ini berpusat pada dimensi manusia dari pembangunan, menekankan keadilan sosial, kesetaraan, inklusivitas, dan peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup penyediaan akses yang setara dan adil terhadap layanan dasar yang esensial, seperti pendidikan berkualitas tinggi, layanan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau, sanitasi yang layak, pasokan air bersih yang aman, serta perumahan yang aman, layak, dan terjangkau bagi semua. Selain itu, aspek sosial juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dan bermakna dari seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan seperti perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Pelestarian warisan budaya, penguatan kohesi sosial, pengurangan kemiskinan ekstrem, dan penanggulangan kelaparan juga merupakan bagian integral dari pilar ini, memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan sebagian kecil populasi tetapi menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

3. Keberlanjutan Lingkungan

Pilar ini adalah inti dari konsep pembangunan berkelanjutan, menyangkut perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan sumber daya alam serta ekosistem untuk jangka panjang. Tujuannya adalah memastikan bahwa kapasitas bumi untuk menopang kehidupan tidak terganggu oleh aktivitas manusia. Ini melibatkan upaya-upaya krusial seperti mengurangi emisi gas rumah kaca untuk memerangi perubahan iklim, melestarikan keanekaragaman hayati (flora dan fauna) yang merupakan fondasi ekosistem, mengelola limbah secara efektif melalui praktik daur ulang, pengurangan sampah, dan pengolahan limbah yang aman, menggunakan energi terbarukan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan ekologis, meminimalkan jejak karbon dan jejak ekologis manusia, serta memastikan ketersediaan sumber daya alam esensial seperti air bersih, udara bersih, dan tanah subur untuk generasi mendatang. Pilar lingkungan seringkali dianggap sebagai fondasi yang menopang pilar ekonomi dan sosial, karena tanpa lingkungan yang sehat, pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat berkelanjutan.

Integrasi ketiga pilar ini menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang benar-benar berkelanjutan. Pembangunan yang hanya fokus pada satu pilar tanpa memperhatikan yang lain cenderung menciptakan masalah baru atau memperburuk masalah yang sudah ada. "Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa regulasi lingkungan yang ketat dapat menyebabkan degradasi lingkungan parah, polusi yang merajalela, dan krisis sumber daya alam, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus bersifat holistik, mempertimbangkan dampak lintas sektor (*cross-sectoral impacts*), dan mencari solusi yang mengoptimalkan ketiga dimensi secara simultan. Pendekatan ini menuntut pemikiran sistemik, pemahaman akan kompleksitas interaksi antar pilar, dan kolaborasi yang kuat antar berbagai pemangku kepentingan untuk menemukan titik keseimbangan yang optimal (Elkington, 1998).

2.2 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2015 meluncurkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) atau yang dikenal juga sebagai Agenda 2030. Transisi dari *MDGs* ke *SDGs* mencerminkan pelajaran yang dipetik dari *MDGs*, yaitu kebutuhan akan agenda pembangunan yang lebih universal, komprehensif, dan terintegrasi. Jika *MDGs* lebih berfokus pada negara-negara berkembang dan isu-isu dasar seperti kemiskinan dan kesehatan, *SDGs* dirancang untuk berlaku bagi semua negara (maju dan berkembang) dan mencakup spektrum tantangan yang lebih luas, termasuk perubahan iklim, ketidaksetaraan, inovasi, dan konsumsi berkelanjutan.

SDGs merupakan serangkaian target universal yang jauh lebih ambisius dan komprehensif dibandingkan *MDGs*, dirancang untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kemakmuran serta perdamaian bagi semua umat manusia. *SDGs* bersifat terintegrasi dan tak terpisahkan, mengakui bahwa tindakan di satu area akan memengaruhi hasil di area lain, sehingga kemajuan di satu tujuan seringkali bergantung pada kemajuan di tujuan lainnya (*United Nations, 2015*). Konsep "tidak meninggalkan siapa pun" (*leaving no one behind*) menjadi prinsip inti *SDGs*, menekankan inklusivitas dan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang paling rentan (*SDGs Center Universitas Sumatera Utara, 2024*).

2.2.1 Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan (SDGs 11)

Dalam konteks penelitian ini, *SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan* menjadi fokus utama. Tujuan ini secara spesifik mengakui peran krusial kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan budaya, namun juga sebagai titik konsentrasi berbagai tantangan pembangunan. Dengan lebih dari separuh populasi dunia tinggal di perkotaan dan proyeksi peningkatan yang

signifikan di masa depan, keberlanjutan kota menjadi prasyarat bagi keberlanjutan global.

Pada era yang penuh dengan perubahan seperti saat ini, tujuan *SDG* No. 11, yaitu menciptakan kota dan komunitas berkelanjutan, menjadi semakin penting. Aspek ini juga merupakan bagian dari Agenda 2030 PBB. Jika berbicara tentang menciptakan kota dan komunitas berkelanjutan, maka ini bukan hanya sekadar tujuan global. Ini adalah visi bagi Indonesia dalam membentuk masa depan yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan untuk seluruh warganya. Bagi Indonesia, definisi *SDG* 11 adalah tentang menciptakan kota-kota yang menawarkan perumahan yang layak dan terjangkau bagi semua penduduk. Termasuk di antaranya adalah membangun infrastruktur publik yang berkualitas, transportasi yang efisien, sanitasi yang baik, serta akses air bersih yang memadai. Hal itu juga menuntut pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan serta perlindungan kota dari potensi bencana alam. Yang tak kalah penting adalah memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait perkembangan kota (Ari Kuncoro, 2022 : 144)

Menurut klopp dalam (Aldi et al., 2021) keberhasilan *SDG* 11 akan tergantung pada sejauh mana mereka dikontekstualisasikan dengan situasi lokal dan diarusutamakan dalam kerangka perencanaan kota lokal dan kendala anggaran. Indonesia telah mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan ke dalam pembangunan nasionalnya melalui kerangka regulasi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Implementasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menurut (SDGs Center Universitas Sumatera Utara, 2024) *SDGs* 11 memiliki target utama yang mencakup berbagai aspek sebagai berikut ini:

a. Perumahan Layak dan Pelayanan Dasar

Pada tahun 2030, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDG*) 11 menargetkan terpenuhinya akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Upaya mengurangi jumlah tunawisma serta

memperbaiki kualitas hidup di kawasan permukiman kumuh menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.

b. Sistem Transportasi Berkelanjutan

Transportasi umum yang efisien berperan dalam mengurangi kepadatan lalu lintas, menekan tingkat emisi, serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan vital. *SDG 11* menekankan pentingnya pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas.

c. Perencanaan Partisipatif dan Berkelanjutan

Mendorong perencanaan kota yang inklusif serta pengambilan keputusan secara partisipatif merupakan cara untuk menjamin keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membentuk arah pembangunan perkotaan. Tujuan ini menyoroti pentingnya kebijakan kota yang terintegrasi dan mampu menyeimbangkan kepentingan di bidang sosial, ekonomi, serta lingkungan.

d. Perlindungan Warisan Budaya dan Alam

Upaya pelestarian warisan budaya dan alam berkontribusi dalam memperkuat jati diri komunitas serta mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. *SDG 11* menekankan pentingnya menjaga kelestarian situs bersejarah, bangunan monumental, dan keanekaragaman hayati yang terdapat di wilayah perkotaan.

e. Pengurangan Dampak Lingkungan Perkotaan

Wilayah perkotaan memiliki peran besar dalam menyumbang polusi dan tingginya konsumsi sumber daya alam. *SDG 11* menetapkan tujuan untuk menurunkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kota, terutama melalui peningkatan kualitas udara dan pengelolaan limbah yang lebih baik.

f. Akses Ruang Publik dan Hijau

Ketersediaan ruang hijau, seperti taman kota dan kebun komunitas, berkontribusi positif terhadap kesehatan fisik dan mental masyarakat perkotaan. Tujuan ini mendorong pemerataan distribusi ruang terbuka hijau guna meningkatkan kualitas hidup seluruh warga kota.

Implementasi *SDGs* 11 di tingkat lokal menuntut adanya integrasi target-target pembangunan ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, RKPD, dan RTRW, serta pelaksanaan program yang nyata di lapangan. Tantangan terbesar terletak pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat benar-benar diimplementasikan secara efektif, bukan hanya sebatas perencanaan formal. Kota-kota yang sedang berkembang pesat seperti Bandar Lampung menghadapi persoalan unik dalam menyeimbangkan laju pertumbuhan dengan prinsip keberlanjutan, sehingga *SDGs* 11 menjadi acuan penting dalam upaya mewujudkan masa depan kota yang lebih baik bagi seluruh warganya.

Secara keseluruhan, *SDGs* 11 memiliki peran strategis dalam membangun kota yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjamin kualitas hidup yang layak bagi masyarakat. Kota berkelanjutan harus mampu mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga tercipta lingkungan yang aman, inklusif, tangguh terhadap bencana, dan ramah lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan implementasi kebijakan yang efektif melalui komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang berkomitmen, serta struktur birokrasi yang mendukung, sebagaimana ditekankan dalam teori implementasi Edward III.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan, setelah kebijakan diformulasikan dan ditetapkan. Menurut Gulo et al. (2024) Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan

ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni, Tahapan pengesahan peraturan perundangan, Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, Kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana, Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni, Penyiapan sumber daya, unit dan metode, Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dijalankan, Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin (Gulo et al., 2024).

Menurut Zen & Mageiasti (2025) implementasi kebijakan terkait *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia merupakan sebuah upaya penting dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks dan beragam. Sejak diadopsinya SDGs oleh PBB pada tahun 2015, negara-negara anggota, termasuk Indonesia, telah berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, yang mencakup penghapusan kemiskinan, kesetaraan gender, akses pendidikan yang berkualitas, perlindungan lingkungan, dan banyak lagi. Namun, perjalanan menuju pencapaian tujuan-tujuan ini tidaklah mudah dan sering kali dipenuhi dengan berbagai rintangan. Indonesia mempunyai keragaman suku, budaya, dan kondisi ekonomi yang sangat kaya. Keberagaman ini menciptakan tantangan unik dalam implementasi

kebijakan, di mana setiap daerah memiliki kebutuhan dan konteks yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal agar kebijakan yang dirumuskan dapat benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, sering kali kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan realitas di lapangan, sehingga terjadi kesenjangan antara tujuan yang ditetapkan dan hasil yang dicapai.

Kota Bandar Lampung, sebagai kota yang sedang berkembang pesat, memiliki berbagai program yang terkait dengan pencapaian *SDGs* 11: Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan. Namun, berdasarkan data dan kondisi eksisting, masih terdapat kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan capaian aktual. Hal ini menunjukkan adanya hambatan implementasi kebijakan, baik dalam hal komunikasi, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana, maupun struktur birokrasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan diharapkan mampu mendorong tercapainya tujuan *SDGs* secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2.4 Model Implementasi George C Edward III

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik, karena pada tahap inilah keputusan politik diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Salah satu teori yang banyak digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980). Menurut Edwards, implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output*, *outcome*). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain.

Model yang dikembangkan oleh Edward dalam Anggara (2014) menjelaskan bahwa terdapat empat faktor utama yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat variabel ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan.

2.4.1 Komunikasi

Menurut Edward III komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi atau pentransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat (Sunarto, 2021).

2.4.2 Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III dalam Anggara (2014), yaitu sebagai berikut.

1. Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Kewenangan. Artinya, kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau, menyediakan

barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerja sama dengan badan pemerintah yang lain, dan lain-lain

4. Fasilitas. Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam bergantung pada kebutuhan kebijakan.

2.4.3 Disposisi

Edward III dalam Anggara (2014) menjelaskan disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut.

1. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang memengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.
2. Arah dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
3. Intensitas *respons* atau tanggapan pelaksana.

2.4.4 Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III dalam Sunarto (2021), yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka membantu penulis merumuskan langkah-langkah secara terstruktur, baik dari aspek konseptual maupun teoritis. Penelitian-penelitian tersebut dijadikan sebagai acuan atau pembanding dalam proses penyelesaian penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Hasil	Perbedaan Penelitian
1	Analisis Penerapan Sdgs Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Tinjauan Literatur Dan Tantangan Implementasi (Zen & Mageiasti, 2025)	Penelitian (Zen & Mageiasti, 2025) menunjukkan bahwa implementasi SDGs di Indonesia sudah terintegrasi dalam RPJMN dan memberikan dampak positif, namun masih terkendala koordinasi,	Perbedaannya adalah fokus penelitian (Zen & Mageiasti, 2025) pada level nasional dengan pendekatan <i>literature review</i> , sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada implementasi SDGs 11 di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori Edward III untuk menganalisis faktor-

		pendanaan, disparitas regional, serta rendahnya kesadaran masyarakat.	faktor yang memengaruhi pencapaian target.
2	Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs). (Trifita & Amaliyah, 2020)	Penelitian Trifita & Amaliyah (2020) menunjukkan bahwa Surabaya berhasil mengimplementasikan <i>Global Public Space Programme</i> (GPSP) melalui kolaborasi multiaktor, pemanfaatan teknologi partisipatif, dan proyek percontohan ruang publik. Fokusnya pada strategi pengelolaan ruang publik untuk mendukung kota berkelanjutan.	Perbedaannya adalah objek dan pendekatan: penelitian Trifita & Amaliyah (2020) membahas Surabaya dan ruang publik, sedangkan penelitian penulis menelaah implementasi SDGs 11 secara keseluruhan di Bandar Lampung dengan menggunakan teori Edward III untuk menganalisis faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
3	Integrasi Target Dan Indikator <i>Sustainable Development Goals</i> Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah (Sofianto, 2022)	Penelitian Sofianto (2022) menunjukkan bahwa implementasi SDGs di Jawa Tengah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota, masih belum optimal. SDGs cenderung hanya dimaknai sebagai urusan Bappeda, sementara integrasi program pemerintah maupun nonpemerintah ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) masih minim. Kendala utama yang ditemukan adalah lemahnya komitmen antar-stakeholder, keterbatasan data, serta kesulitan koordinasi dalam perumusan program dan penyusunan rencana aksi	Penelitian Sofianto (2022) menekankan aspek integrasi perencanaan dalam dokumen resmi daerah (RPJMD, RKPD, RAD SDGs) di Jawa Tengah. Sedangkan penelitian penulis fokus pada implementasi SDGs 11 di Kota Bandar Lampung, dengan menganalisis hambatan dan faktor penentu keberhasilan menggunakan teori implementasi Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi).
4	Implementasi Kebijakan Publik serta Terhadap Kepentingan Publik Berdasarkan Teori Administrasi Negara Saat Ini (Gulo et al., 2024)	Penelitian Gulo et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik di tingkat desa berjalan melalui tiga aspek utama: pembinaan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan pengembangan masyarakat.	Fokus penelitian Gulo et al. (2024). ada pada otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada implementasi SDGs 11 di Kota Bandar Lampung dengan analisis teori Edward III.

Keberhasilan
implementasi sangat
dipengaruhi oleh
komunikasi,
ketersediaan sumber
daya, sikap pelaksana,
serta struktur birokrasi

Sumber : diolah oleh Peneliti, 2026

1. Zen, et al(2025)

Penelitian berjudul “Analisis Penerapan *SDGs* dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Tinjauan Literatur dan Tantangan Implementasi” menggunakan metode *literature review* untuk menelaah sejauh mana kebijakan pemerintah mendukung pencapaian *SDGs*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi *SDGs* dalam RPJMN telah memberikan dampak positif pada pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Namun, tantangan berupa koordinasi antar lembaga, keterbatasan pendanaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya pendekatan adaptif dan kolaboratif lintas sektor untuk mempercepat pencapaian *SDGs*. Perbedaan dengan penelitian penulis penelitian ini bersifat nasional dengan pendekatan literatur, sedangkan penelitian penulis menelaah implementasi *SDGs* 11 secara lokal di Kota Bandar Lampung melalui pendekatan kualitatif lapangan dengan teori Edward III.

2. Trifita & Amaliyah (2020)

Dalam artikel “Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai *SDGs*”, penelitian ini mengkaji strategi Pemerintah Kota Surabaya melalui *Global Public Space Programme (GPSP)*. Strategi yang ditempuh meliputi kemitraan dengan pemangku kepentingan, pemanfaatan gim *Minecraft* sebagai media partisipasi, serta pembangunan ruang publik percontohan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif dapat memperkuat keberhasilan program ruang publik yang inklusif. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa partisipasi masyarakat dan kolaborasi multipihak menjadi kunci tercapainya *SDGs* 11. Perbedaan dengan penelitian penulis penelitian ini

fokus pada strategi ruang publik di Surabaya, sedangkan penelitian penulis menganalisis implementasi *SDGs* 11 di Bandar Lampung dengan menitikberatkan pada variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut Edward III.

3. Sofianto (2019)

Penelitian berjudul “Integrasi Target dan Indikator *SDGs* ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah” menyoroti bagaimana target *SDGs* diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi masih terbatas, cenderung dipandang hanya sebagai kewenangan Bappeda, dan belum menjadi tanggung jawab bersama. Kendala yang dihadapi antara lain lemahnya koordinasi, keterbatasan data, serta kurangnya komitmen dari kepala daerah dan stakeholder terkait. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya peningkatan komitmen politik, tim kerja yang solid, serta ketersediaan data yang akurat untuk memperkuat integrasi *SDGs* di daerah. Perbedaan dengan penelitian penulis penelitian ini menekankan aspek perencanaan (integrasi target *SDGs* ke dalam RPJMD/RAD), sedangkan penelitian penulis menekankan pada aspek implementasi kebijakan *SDGs* 11 di Bandar Lampung dengan kerangka Edward III.

4. Gulo, et al(2023)

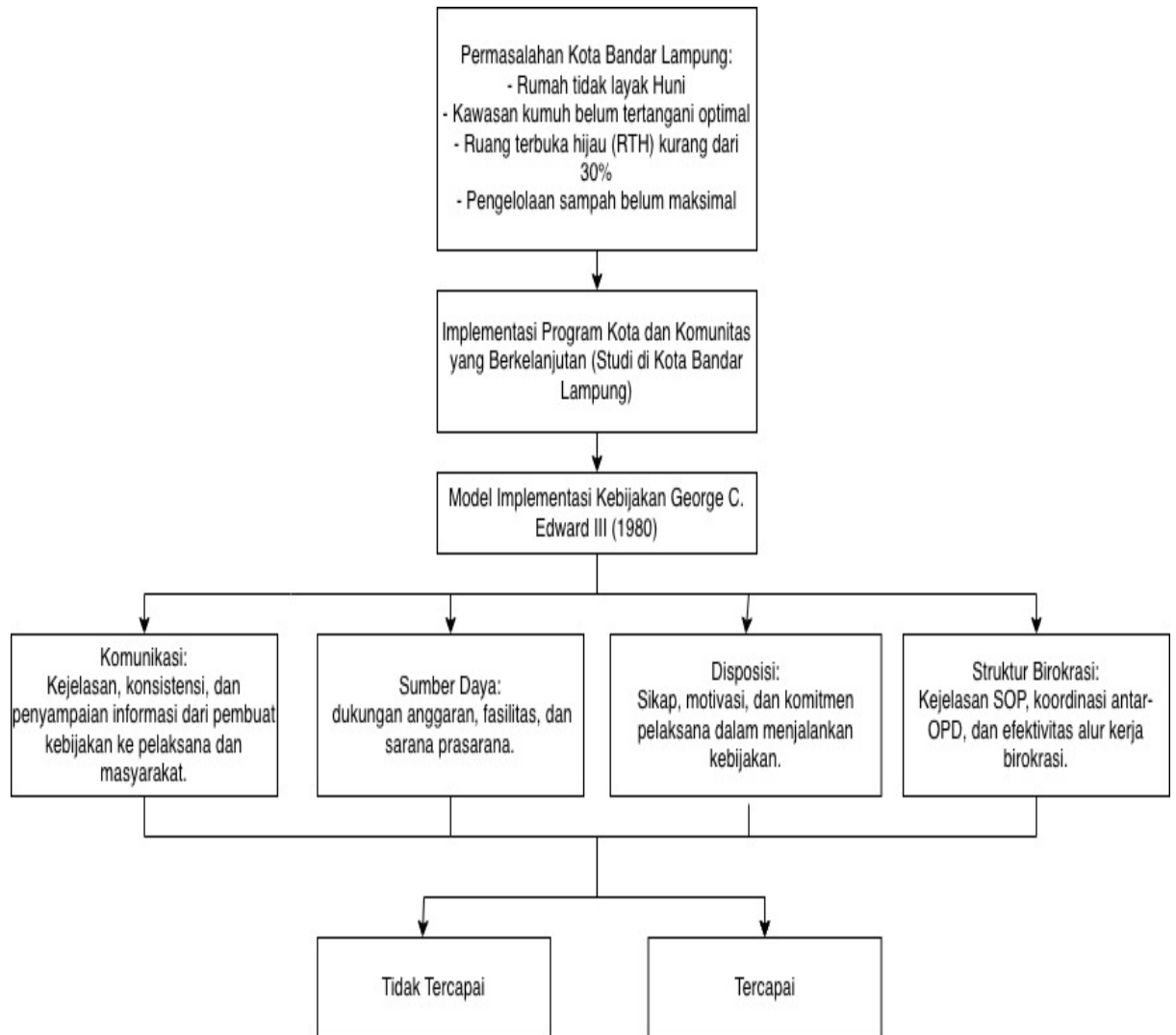
Penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Publik serta terhadap Kepentingan Publik Berdasarkan Teori Administrasi Negara Saat Ini” membahas implementasi kebijakan publik dengan menekankan pada tahapan kebijakan, mulai dari agenda setting, formulasi, legitimasi, implementasi, hingga evaluasi. Penelitian ini menyoroti bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kebijakan publik pada tingkat lokal (desa) dapat berjalan efektif apabila otonomi desa didukung oleh kemandirian dalam mengelola sumber daya, pelayanan publik, serta pengembangan masyarakat. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya monitoring, evaluasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan program. Perbedaan dengan

penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan publik secara umum di tingkat desa dengan perspektif administrasi negara, sedangkan penelitian saya lebih spesifik pada implementasi *SDGs* 11 di Kota Bandar Lampung, menggunakan teori Edward III untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi.

2.6 Kerangka Pikir

Implementasi *SDGs* 11 di tingkat lokal memerlukan integrasi target-target pembangunan secara sistematis ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan RTRW, serta realisasi program yang konkret di lapangan. Tantangan terbesar bukan hanya dalam menyusun perencanaan, tetapi juga dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan secara efektif. Kota Bandar Lampung, sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan pesat, menghadapi tantangan khas dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan. Permasalahan seperti pertumbuhan kawasan permukiman kumuh, keterbatasan ruang terbuka hijau, kemacetan lalu lintas, dan pengelolaan sampah menjadi indikator bahwa implementasi *SDGs* 11 belum sepenuhnya berjalan optimal.

Dalam konteks ini, analisis implementasi kebijakan menjadi penting. Keberhasilan pencapaian target *SDGs* 11 sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap dan komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Oleh karena itu, teori implementasi George C. Edward III digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah bagaimana keempat faktor tersebut berperan dalam menentukan keberhasilan maupun hambatan pencapaian *SDGs* 11 di Kota Bandar Lampung.



Gambar 1 Kerangka Pikir

Sumber : diolah oleh Peneliti, 2026

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai implementasi *SDGs* 11 di Kota Bandar Lampung. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang faktual dan sistematis mengenai implementasi kebijakan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung sekaligus salah satu kota besar di Pulau Sumatera. Kota ini memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Sumatera dengan akses langsung menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Luas wilayah Kota Bandar Lampung mencapai sekitar 183,75 km² (BPS Provinsi Lampung, 2025) dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta urbanisasi yang tinggi menimbulkan tekanan terhadap daya dukung kota dan menjadikan Bandar Lampung sebagai lokasi yang relevan untuk menelaah implementasi *SDGs* 11.

Permasalahan yang dihadapi Kota Bandar Lampung sangat erat kaitannya dengan tujuan *SDGs* 11. Pertama, masih terdapat kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara optimal, menunjukkan bahwa aspek perumahan

layak masih menjadi persoalan serius. Kedua, ruang terbuka hijau di kota ini masih jauh dari target minimal 30 persen, sehingga kualitas lingkungan perkotaan tidak sepenuhnya terjaga. Ketiga, sistem transportasi publik dan lalu lintas perkotaan masih menghadapi persoalan kemacetan dan keterbatasan aksesibilitas. Keempat, pengelolaan sampah dan sanitasi belum berjalan efektif sehingga menimbulkan dampak terhadap kesehatan lingkungan. Kelima, kerentanan terhadap bencana banjir tinggi akibat alih fungsi lahan dan lemahnya pengendalian tata ruang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan yang telah mengintegrasikan target *SDGs* 11 dalam dokumen pembangunan daerah dengan capaian aktual di lapangan. Oleh karena itu, Kota Bandar Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena dapat menggambarkan secara nyata bagaimana proses implementasi *SDGs* 11 dijalankan di tingkat lokal, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat maupun pendukungnya.

3.3 Fokus Penelitian

Program Kota dan Komunitas Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* 11 merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada upaya menjadikan kota dan permukiman sebagai ruang hidup yang aman, inklusif, tangguh, serta ramah lingkungan. Tujuan ini penting mengingat pesatnya pertumbuhan penduduk perkotaan yang diikuti dengan kompleksitas masalah, seperti meningkatnya kawasan permukiman kumuh, keterbatasan ruang terbuka hijau, serta tekanan terhadap infrastruktur dan layanan dasar. *SDGs* 11 dengan demikian menjadi acuan penting dalam merancang pembangunan kota yang lebih berkeadilan dan berkesinambungan.

Dalam konteks Kota Bandar Lampung, meskipun target *SDGs* 11 telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Permukiman kumuh, keterbatasan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah yang belum efektif, serta permasalahan transportasi menjadi contoh nyata bahwa pencapaian *SDGs* 11

masih jauh dari optimal. Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan diri pada implementasi *SDGs* 11 di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang memandang bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama.

1. Komunikasi

Komunikasi menunjukkan suatu proses penyampaian informasi dari sumber kepada penerima, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Proses penyampaian informasi dilakukan secara berkesinambungan dengan tidak menambahkan ataupun mengurangi isi dari informasi yang ada (Caesar et al., 2020). Implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan komunikasi yang dilakukan antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat. Dalam konteks *SDGs* 11, komunikasi mencakup:

- a. Penyampaian tujuan dan sasaran *SDGs* 11 secara konsisten kepada perangkat daerah dan masyarakat.
- b. Kejelasan instruksi dan arahan teknis dari pemerintah daerah agar dapat dipahami oleh pelaksana di lapangan.
- c. Saluran komunikasi yang efektif, baik formal maupun informal, untuk menyebarluaskan informasi mengenai program kota berkelanjutan.
- d. Transparansi pemerintah dalam menyampaikan capaian dan kendala implementasi kepada publik.

2. Sumber daya

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber anggaran/finansial untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut (Caesar et al., 2020). Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan tidak mungkin terlaksana dengan baik. Sumber daya yang dimaksud meliputi:

- a. Sumber daya manusia, yaitu jumlah dan kualitas aparatur pemerintah yang menangani implementasi *SDGs* 11.
- b. Sumber daya finansial, berupa anggaran daerah yang dialokasikan secara cukup dan tepat sasaran.

- c. Sarana dan prasarana, termasuk fasilitas umum, infrastruktur kota, serta teknologi yang mendukung pengelolaan lingkungan dan transportasi.
- d. Kapasitas kelembagaan, seperti kemampuan OPD dalam menyusun program kerja, melakukan koordinasi, serta melaksanakan pengawasan.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Menurut Edward III dalam Caesar et al. (2020) disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan tidak mungkin terlaksana dengan baik. Sumber daya yang dimaksud meliputi:

- a. Sumber daya manusia, yaitu jumlah dan kualitas aparatur pemerintah yang menangani implementasi *SDGs* 11.
- b. Sumber daya finansial, berupa anggaran daerah yang dialokasikan secara cukup dan tepat sasaran.
- c. Sarana dan prasarana, termasuk fasilitas umum, infrastruktur kota, serta teknologi yang mendukung pengelolaan lingkungan dan transportasi.
- d. Kapasitas kelembagaan, seperti kemampuan OPD dalam menyusun program kerja, melakukan koordinasi, serta melaksanakan pengawasan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III dalam Sunarto (2021), yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Struktur organisasi dan mekanisme birokrasi menentukan kelancaran implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, yang menjadi perhatian adalah:

- a. Kejelasan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program yang terkait *SDGs* 11.

- b. Pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar-organisasi perangkat daerah.
- c. Mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif untuk menghindari tumpang tindih kebijakan.
- d. Tingkat fleksibilitas birokrasi dalam merespons dinamika permasalahan perkotaan.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung para informan dalam pelaksanaan *SDGs* 11 (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan) di Kota Bandar Lampung.

3.4.1 Kriteria Pemilihan Informan

Kriteria informan dalam penelitian ini agar sesuai dengan fokus penelitian adalah:

1. Pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan program yang berkaitan dengan *SDGs* 11 di Kota Bandar Lampung.
2. Pihak yang memahami kebijakan dan kegiatan pembangunan berkelanjutan, baik dari aspek lingkungan, perumahan, maupun transportasi.
3. Pihak yang memiliki kewenangan, pengalaman, atau tanggung jawab administratif dalam pelaksanaan kebijakan daerah terkait *SDGs* 11.
4. Pihak dari komunitas atau masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan atau penataan kawasan perkotaan.

3.4.2 Daftar Informan Penelitian

Pada penelitian ini, informan penelitian terdiri dari lima orang dari empat organisasi perangkat daerah serta masyarakat di kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Bapperida memiliki fungsi dalam perencanaan dan sinkronisasi program pembangunan daerah, termasuk pengintegrasian prinsip *SDGs* dalam rencana pembangunan kota. Alasan pemilihan Bapperida dipilih karena memiliki peran strategis sebagai koordinator perencanaan pembangunan lintas sektor yang menjadi dasar implementasi *SDGs* 11. Kepala bidang Infrastruktur dan Kewilayahan secara spesifik dipilih karena bidang ini menangani aspek perencanaan wilayah, tata ruang, dan infrastruktur perkotaan yang mendukung kota berkelanjutan dan kepala bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dipilih karena informan pengevaluasi program *SDGs*
2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung, Penelaah Teknis Kebijakan
DLH berperan penting dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, penanganan sampah, dan pelestarian ruang terbuka hijau. Alasan pemilihan DLH dipilih karena menjadi pelaksana utama kebijakan lingkungan yang langsung terkait dengan indikator *SDGs* 11. Penelaah Teknis Kebijakan dipilih karena informan ahli dalam program *SDGs*.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Bandar Lampung, Fungsional Penata Ruang Ahli Muda
Disperkim memiliki tanggung jawab dalam pembangunan, penataan, dan peningkatan kualitas permukiman masyarakat. Alasan pemilihan Disperkim dipilih karena berperan langsung dalam penanganan kawasan kumuh dan penyediaan perumahan layak huni yang menjadi inti dari target *SDGs* 11. Fungsional penata ruang ahli muda dipilih karena berwenang mengelola

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perumahan dan permukiman di wilayah perkotaan.

4. DPRD Kota Bandar Lampung, Wakil Ketua Komisi III

DPRD berperan sebagai mitra pengawasan dan pengambil kebijakan yang memastikan arah pembangunan kota sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Alasan pemilihan DPRD sebagai informan karena lembaga ini memiliki fungsi strategis dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sehingga dapat menilai sejauh mana program *SDGs* 11 telah diprioritaskan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, DPRD memiliki kewenangan dalam mendorong terbentuknya regulasi dan rekomendasi kebijakan yang mendukung pembangunan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Instansi / Pihak	Bidang	Jabatan Informan	Alasan Pemilihan
1	BAPPERIDA	Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang	Dipilih karena memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kota berkelanjutan. Bidang ini menangani tata ruang, kewilayahan, dan infrastruktur yang menjadi fondasi implementasi <i>SDGs</i> 11.
2	BAPPERIDA	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kepala Bidang	Dipilih karena informan ahli <i>SDGs</i> memiliki peran sebagai pengevaluasi, pengkoordinasi, pengevaluasi program <i>SDG</i> di kota bandar lampung
3	DLH	Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	Penelaah Teknis Kebijakan	Dipilih karena bidang ini merupakan pelaksana teknis utama dalam kebersihan dan pengelolaan sampah perkotaan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas lingkungan dan pencapaian <i>SDGs</i> 11.
4	Disperkim	Perumahan dan Permukiman	Fungsional Penata Ruang Ahli Muda	Dipilih karena bidang ini memiliki kewenangan dalam penataan kawasan kumuh dan pengelolaan program perumahan berkelanjutan sesuai indikator <i>SDGs</i> 11.
5	DPRD	Komisi III	Wakil Ketua	Dipilih karena DPRD memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran yang berpengaruh langsung terhadap implementasi kebijakan <i>SDGs</i> 11 serta berperan penting dalam mendorong

terwujudnya pembangunan kota yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Sumber : diolah oleh Peneliti, 2026

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi *SDGs* 11 di Kota Bandar Lampung.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam implementasi *SDGs* 11. Informan tersebut meliputi pejabat dan staf dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang memiliki kewenangan perencanaan pembangunan, perangkat daerah lain yang terkait dengan isu perkotaan seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, data primer juga diperoleh dari wawancara dengan perwakilan masyarakat yang berkaitan langsung dengan isu-isu kota berkelanjutan, seperti pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, dan transportasi.

2. Data Sekunder

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan. Dokumen yang menjadi rujukan utama antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung, yang memuat integrasi *SDGs* dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, publikasi pemerintah yang terkait program kota dan komunitas yang berkelanjutan (*SDGs* 11)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam implementasi *SDGs* 11 di Kota Bandar Lampung. Informan utama berasal dari unsur pemerintah daerah, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang berperan dalam perencanaan pembangunan, serta perangkat daerah lain yang berkaitan erat dengan pencapaian *SDGs* 11, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, akademisi yang menekuni isu pembangunan berkelanjutan dan tata kota serta perwakilan masyarakat atau komunitas lokal yang aktif dalam isu lingkungan juga dilibatkan agar data yang diperoleh lebih beragam dan komprehensif.

1. Wawancara

Untuk memperoleh data dari para informan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi. Teknik utama adalah wawancara mendalam yang bertujuan menggali pengalaman, pandangan, serta evaluasi para pemangku kepentingan terhadap implementasi *SDGs* 11. Wawancara memungkinkan peneliti memahami secara rinci aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan hambatan birokrasi yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

2. Observasi

Peneliti juga melakukan observasi lapangan terhadap kondisi aktual yang relevan dengan indikator *SDGs* 11, misalnya kawasan permukiman kumuh, ruang terbuka hijau, transportasi perkotaan, serta pengelolaan sampah dan sanitasi. Observasi ini penting untuk memperoleh data faktual sekaligus memverifikasi keterangan yang diperoleh melalui wawancara.

3. Dokumentasi

Teknik lain yang digunakan adalah dokumentasi, dengan mengumpulkan data sekunder dari dokumen resmi pemerintah seperti RPJMD, RKPD,

RTRW, dan BPS Kota Bandar Lampung, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan *SDGs* 11.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut sugiyono dalam Qomaruddin & Sa'diyah (2024) Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif lebih bersifat induktif, yaitu sebuah analisis dengan berdasarkan data yang didapatkan, kemudian diuraikan pola hubungannya atau menjadi hipotesis, selanjutnya dengan berpedoman padahipotesis tersebut maka dicarikan data lagi secara berkelanjutan agar bisamemperoleh kesimpulan apakah hipotesis tersebut bisa diterima atau tidak. Analisis data dalam penelitian kualitatif kebanyakan menggunakan teknik yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang terkenal dengan metode analisis data interaktif. Sedangkan analisis data kualitatif yang harus dilakukan ada tiga tahapan yaitu tahapan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan menyatukan, menyeleksi data yang sangat urgen dan data yang paling pokok dan membuang data-data yang tidak diperlukan. Reduksi data termasuk kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan yang tertulis di lokasi. Ia bukan sekadar proses pemilihan data, melainkan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sampai pada penarikan kesimpulan dan bisa dipertanggungjawabkan.

2. Penyajian Data

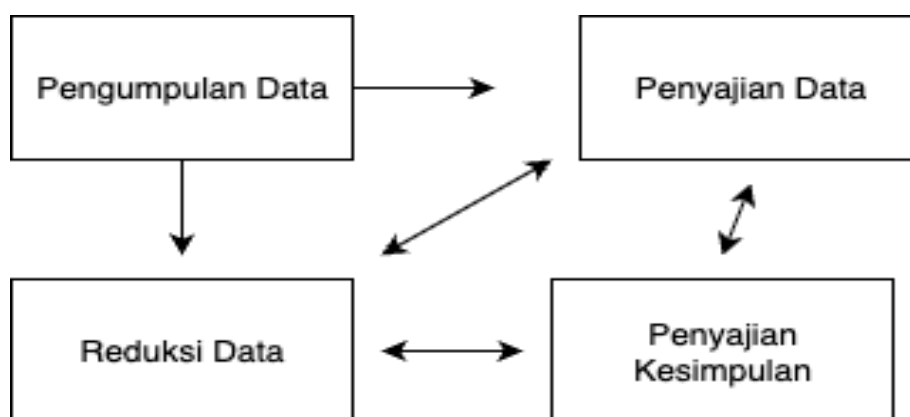
Penyajian data merupakan tahap krusial dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, atau grafik yang

memperlihatkan keterkaitan antarfenomena yang diteliti. Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling banyak digunakan adalah teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan ini dilakukan mulai proses pengumpulan data di lokasi dengan arti lain peneliti harus berusaha memahami makna dari data yang diperoleh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hasil dari suatu proses yang telah dilakukan. Tujuan dari pengambilan kesimpulan ini untuk menentukan langkah selanjutnya. Pengambilan kesimpulan harus didasarkan pada hasil data yang diperoleh dalam penelitian bukan berdasarkan keinginan dari peneliti itu sendiri.

Gambar berikut menunjukkan model analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Model ini menggambarkan bahwa analisis data kualitatif dapat dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, serta berlangsung secara berkesinambungan hingga peneliti mencapai titik kejenuhan data.



Gambar 2 Analisis Data Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024)

3.8 Teknik Keabsahan Data

Moleong dalam Kusumastuti & Khoiron (2019) menjelaskan, pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh penelitian kualitatif. Secara detail Moleong (2010) menjelaskan, beberapa teknik pemeriksaan keabsahan (kesahihan penelitian kualitatif) adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Sebagaimana sudah dikemukakan, peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latang penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

2. Ketekunan/Keajegan Pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentative. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin dalam Moleong (2010) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

4. Analisis Kasus Negatif

Teknik analisis kasus *negative* dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan

informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan.

5. Uraian Rinci

Usaha membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif jelas sangat berbeda dengan nonkualitatif dengan validitas eksternal. Dalam penelitian kualitatif hal itu dilakukan dengan cara uraian rinci (*thick description*)

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Program Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan (SDGs 11) di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa implementasi SDGs 11 belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Variabel komunikasi dalam implementasi SDGs 11 di Kota Bandar Lampung secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya integrasi SDGs 11 ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan Voluntary Local Review (VLR), serta adanya forum koordinasi antar perangkat daerah melalui Musrenbang, rapat koordinasi, dan asistensi yang difasilitasi oleh Bapperida. Namun demikian, komunikasi kepada masyarakat belum berjalan secara optimal karena belum terdapat sosialisasi khusus mengenai SDGs 11 yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Variabel sumber daya dalam implementasi SDGs 11 telah didukung oleh ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada masing-masing perangkat daerah. Meskipun demikian, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, keterbatasan sumber daya manusia, kondisi TPA Bakung yang telah mengalami overload, keterbatasan lahan relokasi, serta belum optimalnya penyediaan ruang terbuka hijau menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung pencapaian target SDGs 11 secara optimal.

Variabel disposisi menunjukkan bahwa secara umum perangkat daerah memiliki komitmen dan sikap yang mendukung implementasi SDGs 11. Komitmen tersebut terlihat dari integrasi program ke dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan berbagai program pembangunan berkelanjutan, serta adanya kolaborasi multipihak melalui program KEM11LAU. Namun demikian, komitmen tersebut masih perlu diperkuat karena beberapa target SDGs 11, seperti ruang terbuka hijau, kawasan kumuh, dan kualitas lingkungan perkotaan, masih belum tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Variabel struktur birokrasi menunjukkan bahwa implementasi SDGs 11 telah didukung oleh adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar perangkat daerah serta keberadaan berbagai dokumen perencanaan dan pedoman pelaksanaan. Akan tetapi, koordinasi lintas sektor, sinkronisasi data, dan integrasi program antar perangkat daerah masih belum optimal.

Secara keseluruhan, implementasi SDGs 11 di Kota Bandar Lampung belum mencapai target yang ditentukan karena masih terdapat berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pelaksanaan program pada beberapa indikator SDGs 11, khususnya ruang terbuka hijau, penanganan kawasan kumuh, dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi *SDGs* 11 di Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Kota dan Komunitas Berkelanjutan, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi dan Integrasi Lintas Sektor

Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah melalui forum yang lebih terstruktur dan rutin, serta memastikan sinkronisasi antara dokumen perencanaan seperti

RPJMD, RKPD, RP3KP, dan RP2KPKPK. Integrasi ini penting agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan dan agar setiap program berjalan selaras dengan target *SDGs* 11.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Dukungan Teknis
Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas teknis aparatur, khususnya pada sektor transportasi, pengelolaan lingkungan, dan perumahan, melalui pelatihan, rekrutmen berbasis kompetensi, serta penguatan sistem data dan teknologi. Penguatan kapasitas ini akan mendukung implementasi kebijakan yang lebih berbasis data dan berkelanjutan.
3. Penguatan Komitmen Anggaran dan Keberlanjutan Program
Diperlukan konsistensi dalam pengalokasian anggaran yang mendukung indikator *SDGs* 11, sehingga program tidak hanya tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi juga terealisasi secara berkelanjutan. Dukungan anggaran yang stabil akan memperkuat intervensi pada penanganan kawasan kumuh, RTLH, pengelolaan sampah, dan transportasi publik.
4. Peningkatan Partisipasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat
Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi program *SDGs* 11 kepada masyarakat serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pemeliharaan lingkungan, pengelolaan sampah, dan penataan permukiman. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program kota berkelanjutan.
5. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang terukur dan terintegrasi untuk memantau capaian indikator *SDGs* 11 secara berkala. Evaluasi berbasis data akan membantu pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan kebijakan secara adaptif dan berkelanjutan.

Dengan adanya penguatan pada aspek koordinasi, sumber daya, komitmen anggaran, partisipasi masyarakat, serta sistem evaluasi, diharapkan implementasi *SDGs* 11 di Kota Bandar Lampung dapat berjalan lebih efektif dan konsisten dalam mewujudkan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajrina, F. I., Putri, H. T., & Maryati, S. (2021). Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Sudut Pandang Pemerintah. *Jurnal of Planning and Policy Development Insitut Teknologi Sumatera*, 1–10.
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. *Pustaka Setia Bandung*.
- Aziz, R., Suherman, S., & Mirajiani, M. (2021). Analisis Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam Rangka Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa*, 3(2), 339–350.
- Bappenas (2020). Metadata Indikator: Pilar Pembangunan Lingkungan. In *Kementerian PPN/Bappenas*.
- Caesar, M. R., Listania, T., & Undang, G. (2020). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Jalanan di Kecamatan Baleendah). *Neo Politea*, 1(2), 1–16.
- Elkington, J. (1998). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1). New Society Publishers.
- Gulo, T. R., Mendrofa, R., & Elazhari. (2024). Implementasi Kebijakan Publik serta Terhadap Kepentingan Publik Berdasarkan Teori Administrasi Negara Saat Ini. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 387–392.
- Haqqi, M. M. (2022). Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 11–28.
- Hidayat, T. (2024). Analisis Triple Bottom Line pada Implementasi Green Marketing di Sektor Industri Indonesia Menggunakan Metode SEM-PLS. *Jurnal Dinamika Bisnis Dan Kewirausahaan*, 1(2), 182–200.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo*, 1–160.

- Pigawati, R. N. B. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). *Teknik Perencanaan Wilayah Kota*, 4(2), 267–281.
- Kuncoro, A., (2022). *United Nations Sustainable Development Goals Implementation Report At Universitas Indonesia 2022*. 126–170.
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Aldi, R. R., Hanna, A., Kiki, W.O. (2021). An Analysis of the 11th SDGs: Sustainable Cities and Communities in Surakarta under the DPSIR Framework. *Journal of Global Environmental Dynamics (JGED)*, 2(3), 1–5.
- SDGs Center Universitas Sumatera Utara. (2024). *Tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)*. SDGs Center Universitas Sumatera Utara.
- Simarmata, D. M., Damai, A. A., Sutiyoso, B. U., Endaryanto, T., Muklis, M., & Affandi, M. (2023). Model Dinamik Pengelolaan Sumberdaya Lahan Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Belantara*, 6(1), 41–53.
- Sofianto, A. (2022). Integrasi Target Dan Indikator Sustainable Development Goals Ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 11(1), 25–41.
- Sunarto. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 97–112.
- Trifita, A., & Amaliyah, R. (2020). Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *Global and Policy Journal of International Relations*, 8(02), 159–174.
- Wadhwani, D., & Malpani, P. (2023). United Nations Sustainable Goals: Global to Local Need of the Hour. *SSRN Electronic Journal*.
- Yanuar, F. L., Ahmad, A., & Tjahjono, G. A. (2024). Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Di Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta tahun 2021. *Geadidaktika*, 4(1), 100.
- Zen, N. H., & Mageiasti, L. (2025). Analisis Penerapan Sdgs Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Tinjauan Literatur Dan Tantangan Implementasi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3, 775–785.

- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2024). *Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025*. Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2025). *Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029*. Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2025). *Laporan pendahuluan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Bandar Lampung Tahun 2025*. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2025). *Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Bandar Lampung: Laporan pendahuluan Tahun Anggaran 2025*. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- SDGs Center Universitas Bandar Lampung. (2025). *Introduction of KEMIILAU Project: Kemitraan multi pihak untuk inovasi SDGs 11 di Provinsi Lampung*
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2024). *Voluntary Local Review (VLR) Kota Bandar Lampung Tahun 2024*